

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan langkah awal dalam menentukan fokus analisis. Fokus ini mencakup substansi atau masalah yang akan diteliti dan permasalahan yang dipecahkan dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Dalam penelitian ini, objek penelitian meliputi Kinerja Keuangan Pemerintah yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Subjek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

3.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

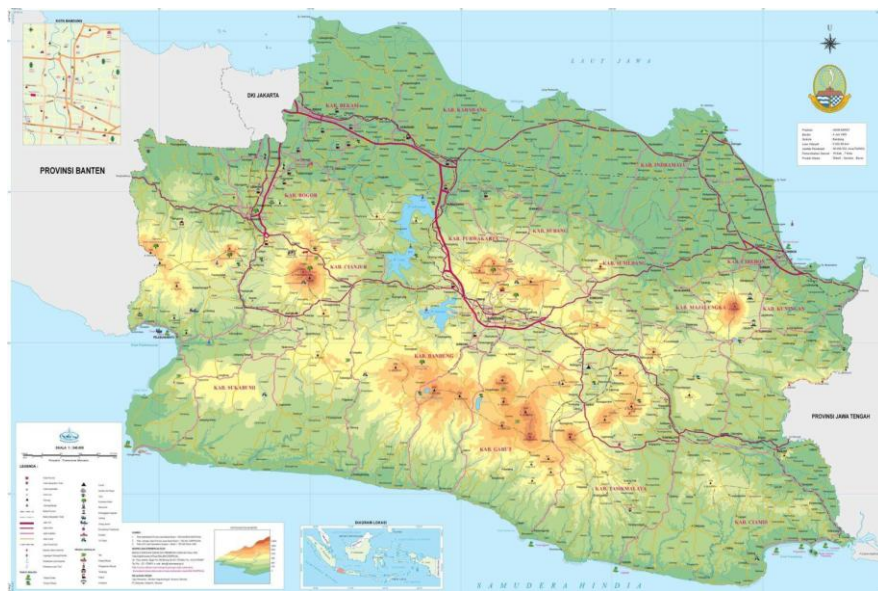
Penelitian ini membahas mengenai perbandingan analisis kinerja keuangan pemerintah kota dan kabupaten sebagai bagian dari upaya untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024. Gambaran umum objek penelitian akan dijelaskan melalui kondisi geografis, kondisi demografis/kependudukan dan kondisi ekonomi.

3.1.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 105°48'–105°48' Bujur Timur dan 5°50'–7°-50' Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografis pada Provinsi Jawa Barat untuk bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, bagian barat berbatasan dengan Provinsi Banten dan Provinsi DKI

Jakarta, bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

Secara administratif, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota. Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 37.087,92 Km² dan kabupaten Sukabumi merupakan wilayah kabupaten terluas du Provinsi Jawa Barat dengan luas 4.145,70 Km² (11,72% terhadap luas wilayah Provinsi Jawa Barat), sedangkan wilayah terkecil adalah kota Cirebon yaitu, 37,26 Km² (0,11% terhadap luas Provinsi Jawa Barat). Wilayah Provinsi Jawa Barat terdri dari 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5.312 desa. Berikut merupakan gambar peta wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat:



Sumber: RJPMD

Gambar 3. 1

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat

3.1.1.2 Kondisi Demografis

Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data penduduk BPS per tahun 2023 tercatat sebanyak

49.860,33 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,18%. Penduduk terbanyak pada tahun 2023 berada di Kabupaten Bogor dengan jumlah 5.627,02 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Bandung dengan jumlah 3.721,11 jiwa dan Kabupaten Bekasi sebanyak 3.237,07 jiwa. Sedangkan daerah yang paling sedikit penduduknya adalah Kota Banjar yaitu 207,51.

Kepadatan penduduk di Jawa Barat tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yang awalnya 1.331 jiwa/km² menjadi 1.346 jiwa/km². Berdasarkan kepadatan penduduk di tahun tersebut, angka tertinggi berada di Kabupaten Bandung yaitu sebesar 15.047 jiwa/Km², dan terendah di Kabupaten Pangandaran yaitu sebesar 382 jiwa/Km².

3.1.1.3 Kondisi Ekonomi

Gambaran umum kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Jawa Barat tahun 2023 dihasilkan oleh industri pengelolaan, yaitu mencapai 41,87 persen. Selanjutnya disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Resparasi Mobil dan Sepeda Mootor sebesar 14,43 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,44 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif. Menguatnya ekonomi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor ekonomi. Ekonomi Jawa Barat tahun 2023 dapat tumbuh baik sebesar 5,00 persen, Hal ini menunjukkan roda perekonomian kembali bergerak hampir merata pada beberapa sektor ekonomi dan salah satu indikator

positifnya adalah penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 7,62 persen, menurun 0,36 persen poin terhadap September 2022 dan turun sebesar 0,44 persen poin terhadap Maret 2022.

3.2 Metode Penelitian

Menurut sugiyono (2023:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu prosedur atau langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid dan reliabel, guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut sugiyono (2023:16) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan penelitian Studi kasus adalah desain penelitian yang mendalam terhadap satu atau lebih kasus. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi terperinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan (Tamaulina et al., 2024:80).

Berdasarkan teori tersebut, penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus adalah jenis penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi penelitian, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode statistik yang sesuai. Dalam penelitian ini, pendekatan ini dipilih karena bertujuan menggambarkan dan membandingkan kinerja keuangan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Barat berdasarkan LRA.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2023:68) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berikut variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan Pemerintah Kota	1. Kemandirian Keuangan Daerah (X_{11})	Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Kawatu, 2019:99).	Kemandirian Keuangan Daerah = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	Rasio
	2. Efektivitas PAD (X_{12})	Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) (Mahmudi, 2019).	Efektifitas PAD = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	Rasio
	3. Efisiensi Keuangan (X_{13})	Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu	Efisiensi Keuangan Daerah = $\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}$	Rasio

		organisasi (Mahmudi, 2019).		
	4. Keserasian (X_{14})	Keserasian merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Kawatu, 2019:118)	Keserasian = $\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	Rasio
	5. Pertumbuhan (X_{15})	Pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif (Kawatu, 2019:95)	Pertumbuhan pendapatan = $\frac{\text{Pendapatan Th } n - \text{Pendapatan Th } (n - 1)}{\text{Pendapatan Th } (n - 1)}$	Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten	1. Kemandirian Keuangan Daerah (X_{21})	Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Kawatu, 2019:99).	Kemandirian Keuangan Daerah = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	Rasio
	2. Efektivitas PAD (X_{22})	Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) (Mahmudi, 2019).	Efektifitas PAD $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	Rasio
	3. Efisiensi Keuangan (X_{23})	Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mahmudi, 2019).	Efisiensi Keuangan Daerah = $\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}$	Rasio
	4. Keserasian (X_{24})	Keserasian merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Kawatu, 2019:118)	Keserasian = $\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	Rasio
	5. Pertumbuhan (X_{25})	Pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah	Pertumbuhan pendapatan = $\frac{\text{Pendapatan Th } n - \text{Pendapatan Th } (n - 1)}{\text{Pendapatan Th } (n - 1)}$	Rasio

pemerintah daerah
dalam tahun
anggaran
bersangkutan atau
selama beberapa
periode anggaran,
kinerja anggaranya
mengalami
pertumbuhan secara
positif atau negatif
(Kawatu, 2019:95)

3.2.3 Teknik Pengumpulan data

Menurut Sugiyono (2023:296) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Jadi dapat juga diartikan bahwa teknik pengumpulan data merupakan metode atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang diperlukan dalam penelitian. Informasi yang dikumpulkan tersebut bertujuan untuk menguji hipotesis atau memberikan rumusan masalah, karena data yang diperoleh menjadi dasar untuk menyusun kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama:

1. Study kepustakaan.

Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori serta konsep dasar yang terkait dengan permasalahan penelitian. Referensi yang digunakan mencakup buku, artikel, dan jurnal keuangan daerah yang relevan dengan isu yang dibahas.

2. Studi dokumentasi.

Peneliti mengumpulkan, mencatat, dan menelaah data sekunder dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari seluruh

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat beserta realisasinya. Data ini diambil dari publikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) melalui situs resminya (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan sumber lain yang terkait dengan ruang lingkup penelitian.

3.2.3.1 Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif karena data yang didapat sudah tersedia. Menurut Sugiono (2023:9) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/scoring.

Sumber data dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran yang dapat diakses melalui Portal Data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kemetrian Keuangan Republik Indonesia yang dapat diakses melalui website resmi di (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>).

3.2.3.2 Populasi sasaran

Menurut Sugiyono (2023:285) populasi di artikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang di provinsi Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten/kota yang menyusun dan mempublikasikan Laporan Realiasasi Anggaran (LRA) selama periode penelitian.

Tabel 3. 2
Populasi Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota	No	Nama Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bandung	15	Kabupaten Subang
2	Kabupaten Bandung Barat	16	Kabupaten Sukabumi
3	Kabupaten Bekasi	17	Kabupaten Sumedang
4	Kabupaten Bogor	18	Kabupaten Tasikmalaya
5	Kabupaten Ciamis	19	Kota Bandung
6	Kabupaten Cianjur	20	Kota Banjar
7	Kabupaten Cirebon	21	Kota Bekasi
8	Kabupaten Garut	22	Kota Bogor
9	Kabupaten Indramayu	23	Kota Cimahi
10	Kabupaten Karawang	24	Kota Cirebon
11	Kabupaten Kuningan	25	Kota Depok
12	Kabupaten Majalengka	26	Kota Sukabumi
13	Kabupaten Pangandaran	27	Kota Tasikmalaya
14	Kabupaten Purwakarta		

3.2.3.3 Penentuan Sampel

Sugiyono (2023:127) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel yang di ambil harus secara representatif untuk mewakili populasi. Sugiyono (2023:128) menjelaskan bahwa teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.

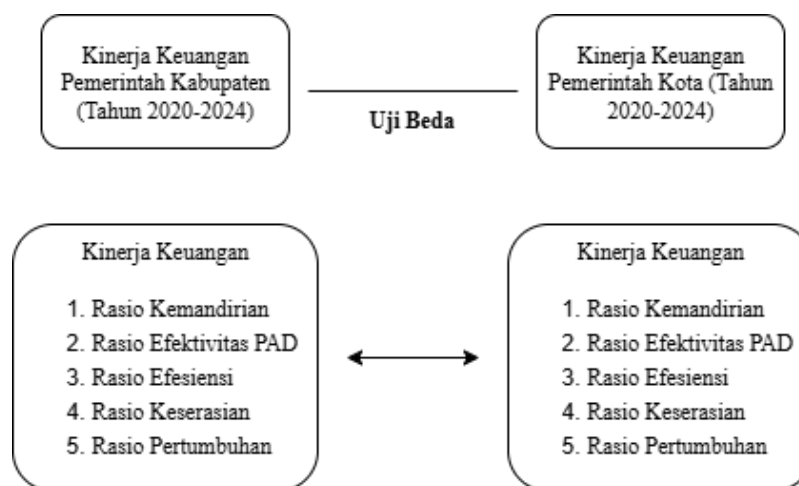
Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Cluster Sampling*. Teknik ini merupakan sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Dalam penelitian ini sampel unit analisis terdiri atas 9 kota dan 9 kabupaten. Sementara itu, periode waktu yang ditetapkan yaitu tahun 2020-2024. Data sampel 9 kabupaten dipilih dari populasi kabupaten yang memiliki kinerja fiskal relatif serupa atau daya saing mendekati, untuk menjaga proporsionalitas representasi.

Tabel 3. 3
Sampel Penelitian

No	Nama Kota	No	Nama Kabupaten
1	Kota Bandung	1	Kabupaten Bandung
2	Kota Banjar	2	Kabupaten Karawang
3	Kota Bekasi	3	Kabupaten Bekasi
4	Kota Bogor	4	Kabupaten Bogor
5	Kota Cimahi	5	Kabupaten Tasikmalaya
6	Kota Cirebon	6	Kabupaten Sukabumi
7	Kota Depok	7	Kabupaten Cirebon
8	Kota Sukabumi	8	Kabupaten Garut
9	Kota Tasikmalaya	9	Kabupaten Subang

3.2.4 Model Penelitian

Paradigma penelitian dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan (Sugiyono, 2023:72). Dalam penelitian ini, Model Penelitian digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. 2
Model Penelitian

3.2.5 Teknis Analisis Data

Menurut Sugiyono (2023:206) analisis merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah di ajukan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan menggunakan analisis rasio pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2024. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan alat bantu statistik yaitu software SPSS 22. Berikut merupakan analisis dalam penelitian ini.

3.2.5.1 Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh terkait permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2023:206) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau rnenggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Uji statistik defkriptif dilakukan sebelum melakukan uji normalitas untuk mengolah data supaya menghasilkan gamabaran distribusi frekuensi satu variabel.

3.2.5.2 Analisis Komparatif

3.2.5.2.1 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini akan menggunakan pengujian non parametrik dengan *Uji Mann-Whitney* dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_{01} : X_{11} = X_{21}$ Tidak terdapat perbedaan tingkat kemandirian keuangan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.

$H_{a1} : X_{11} \neq X_{21}$ Terdapat perbedaan tingkat kemandirian keuangan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.

$H_{02} : X_{12} = X_{22}$ Tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitas PAD pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.

$H_{a2} : X_{12} \neq X_{22}$ Terdapat perbedaan tingkat efektivitas PAD pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.

$H_{03} : X_{13} = X_{23}$ Tidak terdapat perbedaan tingkat efesiensi keuangan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.

$H_{a3} : X_{13} \neq X_{23}$ Terdapat perbedaan tingkat efesiensi keuangan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.

$H_{04} : X_{14} = X_{24}$	Tidak terdapat perbedaan tingkat keserasian pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.
$H_{a4} : X_{14} \neq X_{24}$	Terdapat perbedaan tingkat keserasian keuangan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.
$H_{05} : X_{15} = X_{25}$	Tidak terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.
$H_{a5} : X_{15} \neq X_{25}$	Terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.

3.2.5.2.2 Uji beda *Mann Whitney*

Uji *Mann Whitney* merupakan salah satu uji nonparametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dua data yang saling berpasangan tetapi tidak berdistribusi normal. Uji *Mann Whitney* digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan mean antar kelompok data (sampel) yang tidak berhubungan (independen). Uji ini digunakan pada kelompok data (sampel) yang berskala ordinal (Wulansari, 2023). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji *Mann Whitney* adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
Hal ini berarti, terdapat perbedaan signifikan antara kinerja pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.

- b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hal ini berarti, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.

3.2.5.2.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menyimpulkan H_0 diterima atau di tolak sesuai dengan kaidah keputusan. H_0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kemandirian, tingkat efektivitas PAD, tingkat efisiensi, tingkat keserasian dan tingkat pertumbuhan pada pemerintah daerah kabupten/kota di provinsi Jawa Barat. Sedangkan apabila H_0 ditolak, maka terdapat perbedaan rata-rata tingkat kemandirian, tingkat efektivitas PAD, tingkat efisiensi, tingkat keserasian dan tingkat pertumbuhan pada pemerintah daerah kabupten/kota di provinsi Jawa Barat.